



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Selasa, 14 Oktober 2025



RINGKASAN BERITA HARI INI



TAK RAPI: Kabel menjuntai mengganggu pembangunan double deck RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo kemarin (13/10).

Kabel Semrawut Ganggu Pembangunan Parkir Double Deck RSUD Notopuro

Identifikasi 8 Jenazah Santri Al-Khoziny Maksimal Sebulan



Kondisi Sempel DNA Kurang Baik 55 Korban Teridentifikasi, 20 Anak Asid Surabaya

35 Ponpes di Sidoarjo Tak Lagi Beroperasi



PENDATAAN: Susana Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Minggu (12/10). Kemenag akan meng-upgrade data fasilitas pesantren.

SIDOARJO - Sebanyak 35 pondok pesantren (ponpes) di Sidoarjo tercatat sudah tidak lagi aktif menjalankan kegiatan pendidikan. Data tersebut berdasarkan hasil pemantauan Kemenag Sidoarjo melalui sistem Education Management Information System (EMIS). Dari total 192 pesantren yang terdaftar, hanya 157 pesantren yang masih aktif beroperasi.

Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Sidoarjo M. Sholehuddin menjelaskan, ada



Pelatihan Tata Rias Dorong Kemandirian

SIDOARJO - Sebagai bagian dari kegiatan sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sidoarjo menggelar pelatihan tata rias untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian masyarakat.

Kegiatan pelatihan ini berlangsung di salah satu gedung pertemuan di Kabupaten Sidoarjo. Peserta pelatihan terdiri dari masyarakat yang membutuhkan keterampilan khusus untuk mencari pekerjaan.

Identifikasi 8 Jenazah Santri Al-Khoziny Maksimal Sebulan

SIDOARJO - Tim gabungan dari Dinas Kesehatan (Disnakertrans) dan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sedang melakukan identifikasi jenazah santri yang meninggal dunia di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, pada Minggu (12/10).

Tim gabungan ini terdiri dari tenaga medis, forensik, dan sosial. Mereka sedang melakukan pemeriksaan medis dan administratif terhadap jenazah-jenazah tersebut.

Identifikasi 8 Jenazah Santri Al-Khoziny Maksimal Sebulan

SIDOARJO - Tim gabungan dari Dinas Kesehatan (Disnakertrans) dan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sedang melakukan identifikasi jenazah santri yang meninggal dunia di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, pada Minggu (12/10).

Tim gabungan ini terdiri dari tenaga medis, forensik, dan sosial. Mereka sedang melakukan pemeriksaan medis dan administratif terhadap jenazah-jenazah tersebut.

Tragedi Ponpes Al Khoziny Ada Dugaan Human Error

SIDOARJO - Menanggapi tragedi di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, yang mengakibatkan meninggalnya puluhan santri, ada dugaan adanya kesalahan manusia (human error) yang menyebabkan terjadinya tragedi tersebut.

Salah satu dugaan yang beredar adalah terkait dengan prosedur keamanan dan pemantauan di dalam pondok pesantren.

Kemenag Akui Kesulitan Melacak Perkembangan Ponpes



Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Sidoarjo, Moh Sholehuddin.

Jembatan Gisik Kidul Segera Diperbaiki, Anggaran Capai Rp 1,6 Miliar



SEDATI-Warga Dusun Gisik Kidul, Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, berharap perbaikan jembatan yang ambrol segera dipercepat.

SEDATI-Warga Dusun Gisik Kidul, Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, berharap perbaikan jembatan yang ambrol segera dipercepat. Pasalnya, kerusakan jembatan tersebut membuat aktivitas warga dan pelaku usaha di sekitar kawasan wisata pesisir menjadi terhambat.

Ketua RW 02 Dusun Gisik Kidul, Thohir, mengatakan biasanya akhir pekan menjadi waktu ramai bagi wisatawan yang datang untuk memancing dan menikmati kuliner ikan bakar. Namun sejak jembatan ambrol, pengunjung berkurang drastis karena kendaraan roda empat tidak bisa melintas.

Jangan Salahkan Pengelola, Pemerintah Harus Ikut Bertanggung Jawab

JANGAN sedikit-dikit memvonis pengelola dan pengurus ponpes lalai. Jangan mereka yang langsung disalahkan karena tragedi itu. Pernyataan ini disampaikan Ketua Peradi Sidoarjo Yunus Susanto SH. "Saya lihat semua orang dengan serta merta memvonis dan menyalahkan pengelola dan pengurus ponpes. Tapi menurut saya, itu tidak adil. Ada yang harus lebih bertanggung jawab lagi dari tragedi ini," ujarnya, Senin (13/10).

Menurutnya, pemerintah juga harus ikut bertanggung jawab dalam tragedi ini. "Pemerintah seharusnya mengawasi dan mendampingi ponpes ketika membangun gedung. Tragedi ini tidak akan terjadi bila

Jangan Salahkan Pengelola, Pemerintah Harus Ikut Bertanggung Jawab

pengawasan pembangunan dilakukan dengan baik oleh pemerintah," jelasnya.

Dalam regulasinya, lanjut dia, pembangunan gedung harus disertai perizinan seperti IMB. Begitu melihat atau mendengar ada pembangunan gedung tanpa dilengkapi perizinan, pemerintah wajib turun. "Jangan duduk di belakang meja saja. Harus turun dalam fungsi pengawasan pembangunan," paparnya.

Tidak hanya pemerintah, masih kata dia, wakil rakyat juga harus bertanggung jawab. "Begitu melihat ada pembangunan tanpa dilengkapi perizinan, dewan harus turun ke lokasi dan menjabatinya," katanya.

Seharusnya, begitu tahu ada pembangunan gedung tanpa prosedur, dewan memanggil OPD dan pihak terkait. Dijembatani dan dicari kan kontraktor profesional. "Bukan hanya pengelola ponpes. Pemerintah dan dewan harus membantu pendanaan agar ponpes dapat memiliki gedung yang bagus dan tidak membahayakan santri," jentrehnya.

Yunus Susanto juga memaparkan, ponpes besar seperti Al Khoziny dan lainnya harus dibantu karena itu membesarkan nama Sidoarjo. Ponpes ini mencat kanti-santri handal dari kota-kota di tanah air karena pendidikannya diakui masyarakat puluhan tahun. "Jadi kalau ada kejadian seperti ini, jangan pengelola, pengasuh, dan pengurus ponpes disalahkan dong," tandasnya. (san/epa)

Material 1 RTLH di Terungkulan Salah Harga

Sidoarjo, Memorandum Pembangunan rehab rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Terungkulan, Kecamatan Krian jadi sorotan masyarakat. Diduga, ada yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan penerima bantuan.

Salah satu persoalan RTLH, A Faisal Bobby Handoyo, modin Desa Terungkulan menjelaskan, ada enam rumah penerima bantuan program RTLH. Indikasi kekeliruan hitungan harga material terjadi di rumah milik R. warga Dusun Terungkulan RT 3/RW 1. "Waktu itu juga saya langsung memperbaiki hitungan harga pembelian material yang dibutuhkan perbaikan rumah itu R," ujarnya kepada

memang sangat diharapkan karena rumahnya sangat tidak layak dan perlu ada renovasi atap. "Kalau hujan bocor," cetusnya.

Lantaran rumah dihuni 6 orang, tiga di antaranya masih kecil, S berharap pelaksanaan program pembelian asbes kelentung bisa runtuk atap. "Saat datang, ternyata asbes kelentung kecil dan sempat ditegur anak saya," ceritanya.

"Kasihan anak saya pak modin (Faisal, RED). Ada tiga anak-anak kecil. Apalagi tinggi rumah hanya 3 meter. Sangat panas," ujar wanita lansia tersebut sembari mengeluh jika pesan singkat yang dikirim tak pernah dibalas. (sud/san/epa)

UTILITAS



ANGGER BONDAN/JAWA POS

TAK RAPI: Kabel menjuntai mengganggu pembangunan double deck RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo kemarin (13/10).

Kabel Semrawut Ganggu Pembangunan Parkir Double Deck RSUD Notopuro

SIDOARJO - RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo mengimbau seluruh provider pemilik jaringan kabel utilitas di depan rumah sakit untuk segera melakukan pemindahan jaringan. Sebab, kabel itu mengganggu proyek pembangunan parkir double deck.

Kasubag Humas RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Perdigsa Cahya Binara mengatakan, batas waktu pemindahan kabel diberikan hingga Selasa (14/10) pukul 23.59. "Kami sudah menghubungi, dan mengimbau untuk segera ditata," katanya kemarin (13/10).

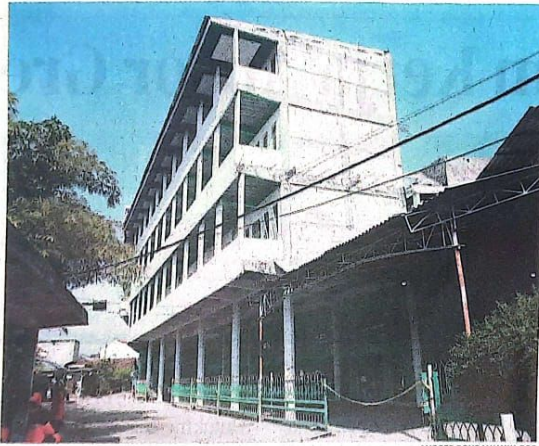
Pihaknya menegaskan, jika sampai batas waktu tersebut jaringan belum dipindahkan, maka kabel akan diputus dan dipindahkan langsung sesuai kebutuhan proyek. (eza/uzi)

Jawa Pos

35 Ponpes di Sidoarjo Tak Lagi Beroperasi

SIDOARJO - Sebanyak 35 pondok pesantren (ponpes) di Sidoarjo tercatat sudah tidak lagi aktif menjalankan kegiatan pendidikan. Data tersebut berdasarkan hasil pemantauan Kemenag Sidoarjo melalui sistem Education Management Information System (EMIS). Dari total 192 pesantren yang terdaftar, hanya 157 pesantren yang masih aktif beroperasi.

Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Sidoarjo M. Sholehuddin menjelaskan, ada



PENDATAAN: Suasana Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Minggu (12/10). Kemenag akan meng-upgrade data fasilitas pesantren.

berbagai faktor yang membuat ponpes kembali tidak aktif. Mulai karena tidak ada penerus pengelola pesantren atau menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. "Tapi kebanyakan karena pengelola sudah tidak ada yang melanjutkan, atau santrinya sudah tidak ada," ujarnya kemarin (13/10).

Selain terkait keaktifan, Sholehuddin mengatakan, tidak semua pengelola pesantren rutin memperbarui data mereka di sistem EMIS. Padahal, pembaruan data seharusnya dilakukan

setiap enam bulan sekali untuk memudahkan proses pengawasan dari Kemenag Sidoarjo.

Akibatnya, Kemenag kesulitan mengetahui perkembangan pesantren, misalnya jika ada penambahan fasilitas baru. "Data yang perlu diperbarui meliputi jumlah guru, santri, serta kondisi sarana dan prasarana. Namun, kesadaran untuk meng-update data masih rendah," ungkapnya. Dengan kejadian di Buduran (Al-Khoziny) kami akan coba perbaiki pendataan lagi," paparnya. **(eza/uzi)**

Jawa Pos

Identifikasi 8 Jenazah Santri Al-Khoziny Maksimal Sebulan

- Kondisi Sampel DNA Kurang Baik
- 55 Korban Teridentifikasi, 20 Anak Asal Surabaya

SURABAYA – Sudah 55 jenazah santri Pondok Pesantren Al-Khoziny Sidoarjo yang teridentifikasi hingga kemarin (13/10) ■

Baca Identifikasi ... Hal 19

Identifikasi Santri Al-Khoziny

Surabaya	20 santri
Bangkalan	15 santri
Sampang	4 santri
Sidoarjo	4 santri
Gresik	2 santri

Masing-masing satu orang santri dari Kota Bekasi, Sumenep, Lamongan, Kota Kediri, Kubu Raya, Bangka, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Bogor, Jember, dan Belitung.

■ Sudah 55 santri teridentifikasi.

■ Masih ada 9 kantong jenazah yang belum teridentifikasi.

■ Data hingga kemarin (13/10) malam.

Sumber: Polda Jatim



Sekarang yang tersisa ini adalah sampel yang sudah kurang bagus."

Kombespol
dr Wahyu Hidayati
Kadiv DVI Pusdokes
Mabes Polri



ANGER BONDAN/JAWA POS

LENGANG: Belum ada kegiatan belajar mengajar lagi di Ponpes Al-Khoziny, Buduran, hingga Minggu (12/10) atau dua pekan setelah musala roboh.

Jawa Pos

Identifikasi 8 Jenazah Santri Al-Khoziny Maksimal Sebulan

Sambungan dari hal 13
Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa

Timur Masih punya pekerjaan rumah untuk mengenali delapan jenazah. Polisi

mengalami kendala karena DNA korban itu dalam kondisi kurang baik. Butuh waktu

sekitar sebulan sejak pengiriman sampel pekan lalu. Kadiv DVI Pusdokes Ma-

bes Polri Kombespol dr Wahyu Hidayati menuturkan, tim DVI menerima 63 laporan kehilangan dari para wali santri pada kejadian akhir September lalu. Sebanyak 55 di antaranya telah berhasil diidentifikasi, termasuk dua data terbaru yang diungkap pada Minggu malam.

"Nah dari 67 kantong jenazah itu apakah cocok dengan 63 yang dilaporkan? Nanti kami periksa dulu," terang Wahyu kemarin.

Wahyu mengungkapkan, kondisi delapan jenazah yang belum teridentifikasi mengalami pembusukan alamiah. Kondisi sidik jari jenazah serta bagian-bagian tubuh tidak lagi dapat dikenali melalui pencocokan antara data *ante mortem* dengan data *post mortem*. Polisi sudah mengirimkan sampel seluruh DNA ke Pusdokes Mabes Polri. Tapi, kondisi sampel DNA yang dikir-

rimkan itu kurang baik. "Sekarang yang tersisa ini adalah sampel yang sudah kurang bagus. Memang jenazahnya sudah dalam posisi tidak banyak mengandung DNA," terang Wahyu.

Berkaca dari Kecelakaan AirAsia 2015

Dia mencontohkan, pada identifikasi jenazah korban AirAsia rute penerbangan Surabaya-Singapura pada 2015 lalu butuh waktu paling lama hingga satu bulan. Karena temuan DNA pada jasad korban dalam kondisi tidak baik sehingga memakan proses yang cukup lama.

"Pada operasi sebelumnya, AirAsia, itu bisa sampai sebulan. Kami bilang mungkin dua minggu, tetapi ternyata fakta di laboratorium berbeda-beda," terangnya.

Sementara itu, Kabidokes Polda Jatim Kombespol M.

Khusnan Marzuki sekaligus Commander DVI Polda Jatim menuturkan, dua jenazah yang berhasil diidentifikasi pada Minggu lalu berasal dari dua kantong jenazah. Kedua santri tersebut sama-sama warga Bangkalan. Yaitu, A. Haikal Fadil Alfatih, 12; dan Syamsul Arifin, 18. Sedangkan kemarin (13/10) dua jenazah kembali teridentifikasi. Yaitu, Khafa Ahmad Maulana, 15, Sidayu, Gresik; dan Irham Ghifari, 16, Krian, Sidoarjo.

"Kedua korban ini berhasil teridentifikasi secara akurat melalui tes DNA, pemeriksaan medis, serta identitas properti yang melekat pada jenazah," ujar Khusnan.

Berdasarkan pendataan, jumlah korban meninggal paling banyak berasal dari Surabaya. Yakni 20 santri, disusul Bangkalan 15 santri, dan Sampang 4 santri.

(leh/jun)

Indeks UV Surabaya Masuk Kategori Sangat Tinggi

Sambungan dari hal 13
"Kondisi ini wajar, tapi tetap disarankan menggunakan pelindung seperti topi atau *sun screen*," katanya. Sementara suhu udara di Surabaya juga terpantau tinggi, berkisar antara 35 hingga 36 derajat Celsius. Meski begitu, potensi hujan masih ada terutama pada

siang hingga malam hari dengan intensitas ringan hingga sedang.

Dokter spesialis kulit dan kelamin dr Ni Putu Ary Widhyasti Bandem MKes SpD-VE FINS DV FAADV mengatakan, paparan sinar UV berlebih bisa menimbulkan berbagai gangguan kulit. Mulai dari *sunburn*, kulit terba-

kar, iritasi, hingga hiperpigmentasi atau flek hitam. "Sinar UV merusak lapisan kolagen dan mempercepat penuaan dini," ujarnya. "Kulit sawo matang tetap bisa terbakar jika terpapar sinar matahari langsung terlalu lama," imbuhnya. Dia menyarankan, penggunaan *sun screen* dengan SPF

minimal 30 dan PA+++ atau lebih. Warga juga disarankan memakai pakaian tertutup, topi lebar, dan kacamata hitam saat beraktivitas di luar ruangan. Aktivitas sebaiknya dihindari pukul 09.00 hingga 15.00. "Kalau terpaksa keluar, cari tempat teduh dan jangan lupa bawa air putih," imbuhnya. (dho/jun)

Dari Pabrik Gula Tulangan hingga Undangan ke Belanda

Sambungan dari hal 13
Nama Tilik Mburi kemudian lahir. Terinspirasi dari film pendek *Tilik* yang sempat

Email dari Negeri Kincir Angin
Dari aktivitas itu, Ditto mulai berjejaring lebih luas. Mo-

Isaac Reydon, adalah pimpinan PG Tulangan. Kakek Odette menikahi nenek buyutnya yang merupakan perem-

memperingati 100 tahun wafatnya Isaac Reydon. "Kami bikin tur khusus dan teatrikal kecil di area

Jawa Pos

Tragedi Ponpes Al Khoziny

Ada Dugaan Human Error

Sidoarjo, Memorandum

Tragedi runtuhnya bangunan empat lantai Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Buduran dipicu dugaan *human error*.

Pernyataan ini dikemukakan praktisi hukum senior, Bambang Soetjipto SH, MHum dan Yustinus Haryanto SH.

Bambang Soetjipto yang sudah puluhan tahun malang melintang di dunia hukum tanah air itu mengatakan, setiap pembangunan rumah ibadah, harus memiliki IMB (izin mendirikan bangunan). "Dan, pembangunannya harus dilakukan oleh kontraktor bangunan yang profesional," ujar Bambang Cip, sapaan

akrabnya kepada *Memorandum*.

Dalam tragedi di Ponpes Al Khoziny yang menelan korban puluhan meninggal dunia dan ratusan luka-luka, ia melihat ada dugaan *human error*. Di mana ada kegiatan santri ikut mengerjakan pembangunan gedung yang tentunya bukan bidangnya. "Santri masih dalam proses pembelajaran, tidak sepatutnya dilibatkan untuk turut serta sebagai tenaga kerja bangunan," jelasnya.

Karena itu, lanjut Bam-



bang Cip, kepolisian harus turun tangan melakukan penyelidikan. Karena kejadian itu tidak boleh dianggap sebagai bencana seperti musibah akibat gunung meletus atau banjir.

"Tetapi, saya mencermati, ada dugaan kuat sebagai peristiwa pidana," tegas Bambang Cip.

Halsenada dikemukakan praktisi hukum dan mantan dosen hukum sebuah perguruan tinggi (PT) di Surabaya, Yustinus Haryanto SH.

Pak Yus, sapaan akrabnya mengatakan, terduga pelaku tragedi Ponpes Al Khoziny dapat dijerat Pasal 359 dan 360 KUHP. "Kedua pasal itu bisa diterapkan secara kumulatif, karena korban banyak. Ada yang meninggal dunia (Pasal 359) ada yang luka berat (Pasal 360 Ayat 1) dan ada yang luka ringan (Pasal 360 Ayat 2)," ujarnya.

Siapa terduga pelaku? Menurut Pak Yus, itu tugas penyidik. Siapa yang lalai memperhitungkan kekuatan konstruksi bangunan yang seharusnya memperhitungkan beban kekuatan bangunan apabila roboh, bisa dijerat pelaku. "Kita lihat saja bagaimana kelanjutannya karena sekarang sudah ditangani penyidik Polda Jatim," tandasnya. (san/epe)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Jangan Salahkan Pengelola, Pemerintah Harus Ikut Bertanggung Jawab

JANGAN sedikit-dikit memvonis pengelola dan pengurus ponpes lalai. Jangan mereka yang langsung disalahkan karena tragedi itu. Pernyataan ini disampaikan Ketua Peradi Sidoarjo Yunus Susanto SH. "Saya lihat semua orang dengan serta merta memvonis dan menyalahkan pengelola dan pengurus ponpes. Tapi menurut saya, itu tidak adil. Ada yang harus lebih bertanggung jawab lagi dari tragedi ini," ujarnya, Senin (13/10).

Menurutnya, pemerintah juga harus ikut bertanggung jawab dalam tragedi ini. "Pemerintah seharusnya mengawasi dan mendampingi ponpes ketika membangun gedung. Tragedi ini tidak akan terjadi bila

pengawasan pembangunan dilakukan dengan baik oleh pemerintah," jelasnya.

Dalam regulasinya, lanjut dia, pembangunan gedung harus disertai perizinan seperti IMB. Begitu melihat atau mendengar ada pembangunan gedung tanpa dilengkapi perizinan, pemerintah wajib turun. "Jangan duduk di belakang meja saja. Harus turun dalam fungsi pengawasan pembangunan," paparnya.

Tidak hanya pemerin-



Ketua Peradi Sidoarjo
Yunus Susanto SH.

tah, masih kata dia, wakil rakyat juga harus bertanggung jawab. "Begitu melihat ada pembangunan tanpa dilengkapi izin, dewan turun ke lokasi dan menjembatani antara

penanggung jawab pembangunan dan OPD yang terkait pembangunan," urainya.

Seharusnya, begitu tahu ada pembangunan gedung tanpa prosedur, dewan memanggil OPD dan pihak ter-

kait. Dijembatani dan dicarikan kontraktor profesional. "Bukan hanya pengelola ponpes. Pemerintah dan dewan harus membantu pendanaan agar ponpes dapat memiliki gedung yang bagus dan tidak membahayakan santri," jlentrehnya.

Yunus Susanto juga memaparkan, ponpes besar seperti Al Khoziny dan lainnya harus dibantu karena itu membesarkan nama Sidoarjo. Ponpes itu mencekak santri-santri handal dari kota-kota di tanah air karena pendidikannya diakui masyarakat puluhan tahun. "Jadi kalau ada kejadian seperti ini, jangan pengelola, pengasuh, dan pengurus ponpes disalahkan dong," tandasnya. (san/epe)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Material 1 RTLH di Terungkulon Salah Harga

Sidoarjo, Memorandum

Pembangunan rehab rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Terungkulon, Kecamatan Krian jadi sorotan masyarakat. Diduga, ada yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan penerima bantuan.

Selaku pelaksana RTLH, A Faisal Bobby Handoyo, modin Desa Terungkulon menjelaskan, ada enam rumah penerima bantuan program RTLH. Indikasi kekeliruan hitungan harga material terjadi di rumah milik R, warga Dusun Terungkulon RT 3/RW 1. "Waktu itu juga saya langsung memperbaiki hitungan harga pembelian material yang dibutuhkan perbaikan rumah ibu R," ujarnya kepa-



Pj Kades Terungkulon (2 dari kiri), kaur kesra (2 dari kanan), dan R (berjilbab).

da Memorandum di Kantor Kecamatan Krian.

Faisal menjelaskan, sudah mengembalikan sisa uang pembelian barang R dalam bentuk barang. Sebab, bantuan rehab dilarang berbentuk uang. Karena itu, Faisal Bobby Handoyo

minta maaf kepada R dan warga Desa Terungkulon bila ada kekeliruan.

Keluhan juga disampaikan S, warga Dusun Kasak RT 6/RW 3 salah satu penerima bantuan. Ditemui di rumahnya, ia menjelaskan bantuan ini

memang sangat diharapkan karena rumahnya sangat tidak layak dan perlu ada renovasi atap. "Kalau hujan bocor," cetusnya.

Lantaran rumah dihuni 6 orang, tiga di antaranya masih kecil, S berharap pelaksana program membelikan asbes keluntung besar untuk atap. "Saat datang, ternyata asbes keluntung kecil dan sempat ditegur anak saya," ceritanya.

"Kasihlah anak saya pak modin (Faisal, RED). Ada tiga anak-anak kecil. Apalagi tinggi rumah hanya 3 meter. Sangat panas," ujar wanita lansia tersebut sembari mengeluh jika pesan singkat yang dikirim tak pernah dibalas. (sud/san/epe)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



Pelatihan tata rias warga Tulangan bersama Kodim dan Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo, Senin(13/10/25)

Pelatihan Tata Rias Dorong Kemandirian

SIDOARJO - Sebagai bagian dari kegiatan nonfisik dalam rangka TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126 Tahun 2025, Satgas TMMD Kodim 0816/Sidoarjo bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo menggelar Pelatihan Tata Rias di Balai Desa Kedondong, Kecamatan Tulangan, Senin (13/10/25).

Kegiatan pelatihan ini merupakan kolaborasi antara Kodim 0816/Sidoarjo, Dinas Tenaga Kerja, dan Pemerintah Desa Kedondong. Tujuannya, memberikan bekal keterampilan serta pengetahuan praktis bagi warga desa, khususnya ibu rumah tangga dan remaja putri, agar memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan menjadi peluang usaha mandiri.

Para peserta tampak antusias mengikuti setiap sesi yang dipandu oleh instruktur dari Dinas Tenaga Kerja. Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan materi teori dan praktik langsung tentang dasar-dasar merias wajah, pemilihan kosmetik yang aman, hingga teknik tata rias untuk acara formal dan pesta pernikahan.

Batiter Kodim 0816/Sidoarjo, Pelda Sutrisno, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini.

"Melalui TMMD, TNI berupaya hadir tidak hanya dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga dalam membangun sumber daya manusia yang berdaya dan mandiri. Pelatihan ini merupakan langkah kecil namun berarti dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa," ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan nonfisik seperti ini menjadi bagian penting dari program TMMD karena menyentuh langsung kehidupan sosial dan ekonomi warga.

"Kami berharap keterampilan yang diperoleh hari ini dapat dikembangkan menjadi usaha produktif, sehingga masyarakat bisa lebih sejahtera dan mandiri," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Desa Kedondong Jamali menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas perhatian Satgas TMMD serta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.

"Kami sangat berterima kasih atas kepedulian TNI dan Disnaker. Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat kami, terutama bagi para ibu dan remaja putri yang ingin menambah keterampilan dan penghasilan," ucapnya.

Terpisah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, Ainun Amalia, S.Sos "terkait pelatihan kepada Duta Masyarakat (duta.co)

Senin (13/10/25) mengatakan, melalui pelatihan tata rias ini, kami berharap masyarakat, khususnya warga yang belum memiliki pekerjaan dapat memperoleh bekal keterampilan untuk membuka usaha-usaha baru di bidang tata rias atau make up.

"Kegiatan seperti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata berupa tambahan penghasilan, sehingga membantu perekonomian keluarga, terutama bagi masyarakat Sidoarjo dan warga Desa Kedondong," ujar Ainun Amalia.

Melihat kondisi dunia industri dan lapangan kerja yang semakin ketat, kami mengajak masyarakat untuk mulai membuka wawasan dan mengasah kemampuan dalam berwirausaha. Dengan begitu, mereka tidak hanya mampu menciptakan peluang kerja bagi diri sendiri, tetapi juga membuka kesempatan kerja baru bagi orang lain.

"Kami berharap kegiatan pelatihan seperti ini tidak berhenti pada kegiatan TMMD saja, namun bisa terus dilanjutkan melalui berbagai program lainnya yang memberi manfaat dan sumbangsih bagi masyarakat Sidoarjo agar semakin berdaya dan mandiri," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, Ainun Amalia. • Loe

Kemenag Akui Kesulitan Melacak Perkembangan Ponpes

KOTA-Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sidoarjo mengungkapkan jumlah pondok pesantren (ponpes) yang tercatat secara resmi di wilayahnya. Berdasarkan data dari Education Management Information System (EMIS), terdapat 192 pesantren yang terdaftar di Kota Delta.

Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 157 ponpes yang masih aktif menjalankan kegiatan. Sementara sisanya sudah tidak beroperasi karena berba-

gai faktor, baik internal maupun eksternal.

“Yang tidak aktif ini kemungkinan disebabkan tidak ada penerus yang melanjutkan pengelolaan pondok, atau karena kehilangan kepercayaan dari masyarakat,” ujar Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Sidoarjo, Moh Sholehuddin, Senin (13/10).

Sholehuddin menjelaskan, pihaknya mengalami kendala dalam memantau

● Ke Halaman 10



Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Sidoarjo, Moh Sholehuddin.



Kemenag Akui...

perkembangan pesantren karena tidak semua pengelola melakukan pembaruan data secara berkala melalui EMIS.

Sesuai ketentuan, data pesantren di sistem tersebut seharusnya diperbarui setiap semester atau setiap enam bulan sekali. Pembaruan itu meliputi informasi tentang jumlah tenaga pengajar, santri, serta sarana dan prasarana yang dimiliki.

“Namun, kesadaran untuk memperbarui data masih rendah. Akibatnya,

Kemenag tidak bisa memantau kondisi pesantren secara menyeluruh,” terangnya.

Ia menambahkan, masih banyak ponpes yang tidak melaporkan perkembangan bangunan atau penambahan fasilitas baru. Hal ini membuat Kemenag kerap tidak mengetahui perubahan yang terjadi di lapangan.

Lebih lanjut, Sholehuddin menjelaskan bahwa mekanisme perizinan pesantren berbeda dengan lembaga pendidikan formal seperti madrasah. Jika madrasah wajib memenuhi kelengkapan

sarana dan prasarana sebelum izin diterbitkan, maka pesantren justru memiliki mekanisme sebaliknya.

“Untuk pesantren, yang penting sudah ada santri mukim minimal 20 orang, kegiatan mengaji, dan asrama santri. Setelah itu baru bisa diajukan izin operasional ke Kemenag,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa urusan perizinan mendirikan bangunan bukan menjadi kewenangan Kemenag.

“Itu sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah atau dinas terkait,” pungkasnya. (sai/vga)



✓ Jembatan Gisik Kidul Segera Diperbaiki, Anggaran Capai Rp 1,6 Miliar

SEDATI-Warga Dusun Gisik Kidul, Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, berharap perbaikan jembatan yang ambrol segera dipercepat. Pasalnya, kerusakan jembatan tersebut membuat aktivitas warga dan pelaku usaha di sekitar kawasan wisata pesisir menjadi terhambat.

Ketua RW 02 Dusun Gisik Kidul, Thohir, mengatakan biasanya akhir pekan menjadi waktu ramai bagi wisatawan yang datang untuk memancing dan menikmati kuliner ikan bakar. Namun sejak jembatan ambrol, pengunjung berkurang drastis karena kendaraan roda empat tidak bisa melintas.



M. SAIFUL ROHMAN/RADAR SIDOARJO

● Ke Halaman 10

BUTUH PENANGANAN: Kondisi jembatan Gisik Kidul ambrol dan tidak bisa dilalui warga



✓ Jembatan Gisik...

“Beberapa pedagang mengeluh karena akhir pekan ini cukup sepi. Biasanya para pemancing datang bersama keluarga untuk bakar ikan di sini, tapi sekarang berkurang,” ujarnya, Senin (12/10).

Thohir berharap perbaikan segera dilakukan agar aktivitas warga dan pelaku usaha kembali normal.

“Semoga pengerjaannya cepat selesai, supaya warga dan pengunjung bisa beraktivitas dengan nyaman lagi,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo, Dwi Eko Saptono, memastikan perbaikan jembatan Gisik Kidul akan dimulai dalam waktu dekat. Anggaran sebesar Rp 1,6 miliar dari APBD Sidoarjo telah disiapkan untuk memperbaiki jembatan penghubung menuju kawasan wisata tersebut.

“Dalam pekan ini kami masih menyelesaikan proses administrasi. Rekonstruksi akan dimulai selambat-lambatnya dalam sepuluh hari ke depan,” jelasnya.

Dwi Eko menambahkan, pihaknya juga tengah menyiapkan jembatan sementara agar kendaraan roda empat bisa kembali melintas sebelum perbaikan utama rampung.

“Kami upayakan jembatan sementara bisa digunakan secepatnya agar aktivitas warga tidak terganggu,” terangnya.

Selain Jembatan Gisik Kidul, DPUBMSDA Sidoarjo juga dijadwalkan rehabilitasi di delapan titik jembatan lainnya, yakni di Bluru, Penatarsewu, Kedungbanteng, Tarik-Kwatu, Candipari, Candinegoro, Watugolong, dan Banjarsari.

“Kami ingin seluruh jembatan di Sidoarjo dalam kondisi layak dan aman dilalui masyarakat,” pungkasnya. (sai/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Tak Berniat Kejar Ketertinggalan, Disidak Duet Komisi C dan D DPRD Sidoarjo Progress Proyek RSUD Sedati Tetap Lemot



Sidoarjo (republikjatim.com) - Progress proyek pembangunan RSUD Sedati senilai Rp 51,7 miliar yang dikerjakan PT Ardi Tekindo Perkasa (ATK) Surabaya dinilai berjalan terlalu lamban. Ini menyusul pekerjaan proyek mercusuar Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Sidoarjo untuk melayani masyarakat pesisir Sidoarjo itu, baru diselesaikan 3 persen.

Padahal, proyek senilai puluhan miliar itu, berdasarkan kontrak kerjanya pekerjaan sudah dimulai Juli Tahun 2025, namun hingga kini tidak ada perkembangan signifikan atas proyek pembangunan RSUD Sedati ini. Kondisi itu, memantik kekecewaan para pimpinan dan anggota Komisi C dan Komisi D DPRD Sidoarjo. Dua komisi yang membidangi pembangunan dan pelayanan kesehatan itu, langsung menggelar sidak ke lokasi proyek itu. Bahkan, para wakil rakyat ini merasa kecewa berat atas hasil pekerjaan proyek itu selama 3 bulan terakhir ini.



Bahkan pimpinan dan anggota dewan yang ikut sidak menilai kontraktor pelaksana proyek RSUD Sedati tidak bisa bekerja secara profesional. Salah satu buktinya, kontraktor tidak mampu mengejar ketertinggalan dan keterlambatan target penyelesaian pekerjaan di proyek terbesar di wilayah Kecamatan Sedati itu.

"Saat kami sidak ke lokasi bersama beberapa anggota dewan tadi, kami mendapat penjelasan dari berbagai pihak. Termasuk dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Sidoarjo. Kami juga meminta konsultan pengawas dan kontraktornya untuk memaparkan hasil progress pekerjaan fisik pembangunan RSUD Sedati. Sayangnya hasilnya masih terlambat dari target awal," ujar



Politisi senior PDI Perjuangan yang akrab disapa Abah Dayat ini, menyimpulkan progress pekerjaan fisik di lapangan yang dikerjakan rekanan PT ATK Surabaya itu sudah mulai dikerjakan sejak Juli hingga memasuki Oktober 2025. Namun, progress pembangunan RSUD Sedati senilai Rp 51,7 miliar itu, baru selesai sekitar 3 persen saja.

"Bagi kami, progress pekerjaan sebesar itu masih keterlambatan dan masih sangat minim," ungkap politisi asal Desa Lebo, Kecamatan Sidoarjo ini.



Bagi politisi yang juga pernah menjabat Kepala Desa (Kades) Lebo ini, dengan progress sebesar itu, pihaknya sangat menyesalkan dan kecewa berat. Bagi Abah Dayat semestinya dengan pekerjaan yang sudah berlangsung dalam waktu sekitar tiga bulan itu, progressnya minimal mencapai 20 persen.

"Informasinya lambannya pekerjaan ini karena pihak kontraktor terkendala pembiayaan. Kalau itu benar yang terjadi, berarti kontraktornya memang benar-benar tidak profesional dalam mengerjakan proyek untuk pelayanan kesehatan masyarakat pesisir Sidoarjo ini," tegas anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo dari Dapil I wilayah Kecamatan Sidoarjo, Buduran dan Kecamatan Sedati ini.

Menurut Abah Dayat, terlambatnya kinerja kontraktor itu juga dapat diukur dari hasil pengerjaan fisik di lapangan yang baru sebatas pembuatan pondasi, dengan beberapa tiang pancang (paku bumi) yang belum selesai 100 persen. Bahkan terlihat di lokasi proyek, belum adanya peningkatan aktivitas kerja sebagai upaya percepatan kinerja yang dilakukan PT ATK Surabaya atas pembangunan rumah sakit di wilayah Sidoarjo Utara itu.

"Berdasarkan keterangan dari Dinkes Pemkab Sidoarjo, hampir setiap pekan ada rapat dengan kontraktor yang isinya membahas progress dan permasalahannya. Kami sempat meminta untuk diundang dalam rapat di dewan. Karena kami juga berencana segera menggelar hearing untuk mengurai permasalahan ini dengan mengundang semua pihak. Baik dari Dinkes, kontraktor maupun pengawasnya. Kami tidak ingin ada masalah dalam pembangunan RSUD Sedati itu," pinta Abah Dayat.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih : Manfaatkan Lahan Tidur Untuk Sukseskan Swasembada dan Ketahanan Pangan



Liputan5news.com - Sidoarjo. Swasembada dan ketahanan pangan merupakan program Asta cita Presiden yang harus kita sukseskan. Untuk mendukung suksesnya ketahanan dan swasembada pangan dapat kita lakukan dengan cara menghidupkan kembali lahan tidur.



Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih saat menghadiri kegiatan tanam jagung serentak kuartal IV di lahan Desa Sepanjang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan tanam jagung serentak dilaksanakan oleh Polresta Sidoarjo pada Rabu (8/10/2025).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing, Wakapolresta Sidoarjo AKBP M.Z. Rofik, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, mewakili Dandim 0816 Sidoarjo Kanten Arh Siswanto, Forkonimka Taman, tokoh agama, perwakilan Bulog dan kelompok tani setempat.





Pemerintah terus berkomitmen dalam memperkuat ketahanan pangan dan swadaya pangan nasional melalui program transformasi lahan tidur menjadi lahan produktif (lahan hijau). Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan yang adaptif terhadap krisis iklim dan proaktif menghadapi dinamika geopolitik global.

Terkait transformasi lahan tidur menjadi lahan produktif (lahan hijau), dalam keterangannya kepada awak media Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih menyampaikan kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh masyarakat, baik itu dinas pertanian maupun Polresta Sidoarjo termasuk pihak ketiga pihak swasta yang lain, karena ini memang suatu keharusan mulai dari tingkat nasional untuk swasembada pangan dan ketahanan pangan.

"Untuk itu kami berharap kepada seluruh masyarakat, terutama perusahaan - perusahaan atau instansi lainnya yang memiliki lahan tidur agar mengalokasikan program swasembada pangan dan ketahanan pangan dengan cara menghidupkan kembali lahan tidurnya menjadi lahan yang produktif," jelasnya.

Lanjut Nasih, untuk menghidupkan kembali lahan tidur ini masyarakat bisa bekerjasama dengan dinas atau pihak lain. Sehingga dengan hidupnya kembali lahan tidur ini paling tidak ada dua target yang kita capai yakni pertama tercapainya swasembada pangan dan ketahanan pangan. Kedua menjadikan lahan tidur menjadi lahan produktif (lahan hijau) dan tidak gersang.

"Berdasarkan laporan Bappeda selama ini indeks indikator lahan hijau Sidoarjo ini masih rendah belum bisa mencapai target. Sehingga dengan memaksimalkan lahan tidur menjadi lahan hijau paling tidak bisa meningkatkan indeks indikator lahan hijau sehingga Sidoarjo tidak tampak gersang," ungkapnya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sementara Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, M Dhamroni Chudlori didampingi beberapa anggota lainnya diantaranya Sutadji, Tarkit Erdianto dan Wahyu Lumaksono yang ikut sidak ke lokasi proyek juga merasa kecewa berat atas kinerja kontraktor pelaksana. Meski dalam sidak itu, para wakil rakyat ini ditemui Plt Kepala Dinkes Dr Lakhmie dr Lakhmie Herawati maupun dari perwakilan pihak kontraktor pelaksana pekerjaan.



"Setelah mendapat pemaparan dari berbagai pihak, kami menangkap indikasi ketidakmampuan pihak rekanan (PT ATK Surabaya) menyelesaikan pekerjaan itu sesuai target. Dari penjelasan pekerjaan fisik kurang 19 persen dari target. Ini kan menunjukkan ketidakmampuan kontraktor menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai target. Lambatnya kinerja ini harus disikapi secara tegas oleh semua pihak," jelas politisi senior PKB Sidoarjo yang akrab disapa Cak Dham ini.

Selain itu, Cak Dham menguraikan sidak itu tentunya terkait dengan berbagai persoalan di lapangan. Terutama, menyangkut teknis pekerjaan di lapangan. Sesuai tupoksinya, tujuan Sidak hanya ingin memastikan pembangunan rumah sakit ini selesai tepat waktu. Harapannya, agar hasilnya bisa segera dinikmati masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan.

"Untuk Dinkes Pemkab Sidoarjo, kami dengan tegas meminta agar pembangunan RSUD Sedati ini jangan sampai molor. Karena keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat untuk peningkatan pelayanan kesehatan," papar politisi senior PKB asal Kecamatan Tulangan ini. Sedangkan soal lemotnya kinerja PT ATK Surabaya, Cak Dham juga meminta agar Dinkes Pemkab Sidoarjo sebagai leading sector pembangunan rumah sakit ini bersikap tegas. Pihaknya meminta jangan sampai ada toleransi yang justru melahirkan persoalan dalam pembangunan rumah sakit itu.

"Kalau memang kontraktor tidak mampu, sebaiknya mundur saja. Kemudian Dinkes Pemkab Sidoarjo membayar sesuai dengan progress pekerjaannya yang diselesaikan rekanan itu," tandas Cak Dham yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo ini.

Tidak hanya itu, politisi PKB yang sudah menjabat beberapa kali ini menilai mundurnya kontraktor menjadi solusi tepat saat ini. Selanjutnya, pembangunan RSUD itu diserahkan kontraktor lain, yang sebelumnya menjadi pemenang nomor urut 2 pada saat lelang kemarin.

"Saya berkeyakinan kalau kondisi seperti ini dibiarkan, pembangunan RSUD Sedati tidak bisa selesai tepat waktu. Saya kira masih banyak rekanan lain di Sidoarjo yang mampu bekerja lebih profesional dan mampu menyelesaikan pekerjaan itu tepat waktu sesuai kontrak pekerjaan," pungkasnya. Hel/Waw



Pemkab Sidoarjo Bersama Kabupaten Kota di Jatim Tanda Tangan Nota Kesepakatan Restorative Justice dan Kesepakatan Bersama Pembangunan Daerah



Bangkitpos.id, ,Sidoarjo,- Penandatanganan nota kesepakatan Restorative Justice (RJ) antara pemerintah daerah di Jawa Timur dengan seluruh Kejaksaan Negeri dilakukan. Penandatanganan kesepakatan kolaborasi penanganan terhadap pelaku dan korban serta keluarga pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif itu dilakukan di Dyndra Convention Hall Surabaya, Kamis, (9/10). Penandatanganan diawali oleh Kajati Jatim Kuntadi dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang kemudian disusul oleh seluruh kepala daerah di Jawa Timur.

Kajati Jatim Kuntadi mengatakan penandatanganan nota kesepakatan restorative justice ini sangat penting. Dikatakannya penyelesaian perkara diluar pengadilan akan mendekatkan rasa keadilan bagi masyarakat. Disampaikannya masyarakat kadang melihat proses hukum itu dari kacamata yang berbeda dan ukuran rasa keadilan yang juga berbeda. Padahal penegakan hukum yang dilakukan aparat selma ini sudah tepat dan benar. Itu terjadi pada kasus Nenek Minah dan Kakek Samirin. Kepastian dan keadilan kepada mereka sudah ditetapkan sesuai hukum yang berlaku.

“Tadi kepastian, keadilan sudah di wujudkan, pertanyaannya apakah penegakkan hukum itu bermanfaat bagi masyarakat itu, dan ternyata tidak, maka masyarakat menolak, nah peristiwa ini baru dijawab 20 tahun kemudian melalui kebijakan Jaksa Agung dengan disetujuinya pola penyelesaian alternatif, penyelesaian diluar persidangan melalui forum RJ,”ucapnya.

Kuntadi mengatakan sejak kebijakan RJ itu diambil, ribuan perkara seperti kasus Nenek Minah dan Kakek Samirin dihentikannya. Oleh karenanya ia melihat ada ribuan perkara seperti itu yang tidak pantas diselesaikan dipersidangan. Masyarakat sendiri menyambut baik penyelesaian perkara lewat RJ. Menurutnya RJ sebagai sebuah solusi dan trobosan yang mengedepankan pemulihan pada keadaan sebelumnya.

“Kebijakan ini (RJ) tidak akan pernah berjalan dengan baik apabila kami berjalan sendirian karena kebijakan Restorative Justice ini tidak kita terapkan untuk semua perkara, tetapi hanya perkara-perkara tertentu yang lebih kepada isu-isu yang dlatarbelakangi kondisi sosial dari keluarga kita atau saudara-saudara kita yang rentan berhadapan dengan hukum,”ucapnya.

Sementara itu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan penyelesaian perkara diluar pengadilan melahirkan sejarah baru bagi proses perlindungan hukum untuk masyarakat. Oleh

karenanya ia meminta seluruh daerah di Jawa Timur dapat menindak lanjuti kebijakan RJ didaerahnya. Menurutnya efektifitas RJ tergantung dukungan kepala daerah.

“Efektifitas RJ ini akan sangat tergantung tindaklanjut kita semua,”ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama pembangunan daerah antara Gubernur Jatim dan seluruh kepala daerah di Jawa Timur. Selain itu juga digelar FGD Tata kelola yang baik pada pengadaan barang dan jasa di Provinsi Jawa Timur



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Nasih juga menyampaikan untuk menghidupkan kembali lahan tidur masyarakat bisa menanam berbagai macam tanaman diantaranya : tanaman palawija (jagung, kacang tana) dan tanaman hortikultura diantaranya sayuran (terong, cabai, tomat), buah - buahan (semangka, melon), tanaman hias, tanaman obat.

Disinggung mengenai dukungan DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap swasembada pangan dan ketahanan pangan di Sidoarjo, Abdillah Nasih menyampaikan kami akan berkoordinasi dengan pihak dinas pertanian, apa yang perlu dibutuhkan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) mulai dari kebijakan, pelatihan, penganggaran, alat pertanian, pupuk. Insya Allah DPRD Kabupaten Sidoarjo akan hadir dan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah - masalah tersebut.

Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Abdillah Nasih juga menyampaikan penanaman jagung serentak kuartal IV yang dipimpin Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kabupaten Tangerang, Banten, merupakan wujud nyata semua stake holder dalam mensukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di bidang swasembada pangan.

Disinggung juga mengapa tanaman jagung ini dijadikan tanaman swasembada pangan, Nasih menyampaikan tanaman jagung dijadikan tanaman swasembada pangan karena dengan berbagai alasan diantaranya :

- Potensi produksi tinggi : dalam hal ini jagung memiliki tingkat produksi yang cukup besar dan bisa menjadi alternatif pangan pokok yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan nasional.
- Kandungan gizi yang baik : jagung mengandung karbohidrat yang tinggi, serta lebih unggul dari beras dalam hal kandungan serat dan protein. Jagung juga kaya akan vitamin B dan mineral, menjadikannya pilihan pangan yang lebih sehat.
- Adaptasi lahan : jagung lebih toleran terhadap perubahan iklim dan dapat tumbuh di berbagai jenis lahan termasuk lahan kering dan marginal yang sulit ditanami padi
- Fungsi serbaguna : selain sebagai bahan pangan manusia, jagung juga sangat penting sebagai bahan baku utama untuk industri pakan ternak. Sehingga jagung menjadi komoditas strategi yang mendukung sektor pertanian dan ekonomi secara keseluruhan.
- Mendukung ketahanan pangan nasional : dengan mengoptimalkan produksi jagung, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor jagung. Hal ini merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mencapai kemandirian pangan.

Sementara itu, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Christian Tobing menyampaikan Polri terus berupaya mewujudkan ketahanan pangan nasional dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, TNI, instansi pemerintah, para stakeholder terkait, serta seluruh elemen masyarakat, salah satunya melalui gerakan penanaman jagung ini.



Pada tahap kali ini, lahan yang dipersiapkan untuk penanaman jagung di wilayah Kabupaten Sidoarjo menurut Kombes. Pol. Christian Tobing ada sekitar 200 hektar lahan. Harapannya bibit jagung yang ditanam nanti hasil panen dapat melimpah melalui pendampingan yang dilakukan pihak kepolisian yang berkolaborasi dengan stake holder terkait dan masyarakat.

Usai melakukan penanaman jagung, pada kesempatan ini Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo bersama Forkopimda dan Bulog melakukan pemberangkatan hasil panen jagung sebanyak 30 ton ke gudang Bulog Surabaya. "Hasil panen jagung di kuartal III menunjukkan semangat dan keseriusan semua pihak dalam mensukseskan program ketahanan pangan mendukung Asta Cita Presiden," kata Wabup Sidoarjo Mimik Idayana.,(Yanti)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Riset dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Proyek Betonisasi Jalan Kalanganyar–Segorotambak Dikebut, Target Rampung Desember 2025



SURABAYAONLINE.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di wilayah timur. Saat ini, proyek betonisasi ruas Jalan Kalanganyar–Segorotambak sedang digarap dengan panjang mencapai 1.945 meter dan lebar 4 meter. Proyek ini menjadi salah satu fokus utama Pemkab Sidoarjo tahun 2025.

Menurut Bupati Sidoarjo H. Subandi proyek betonisasi jalan tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2025. Bupati berharap pengerjaan betonisasi ruas Jalan Kalanganyar-Segorotambak berjalan lancar. Proyek betonisasi jalan yang menghubungkan Kota Surabaya itu diharapkan juga selesai tepat waktu.

“Proyek betonisasi ruas Jalan Kalanganyar-Segorotambak ini menjawab aspirasi masyarakat yang selama ini mengeluhkan kondisi jalan yang kerap rusak,” kata Bupati Subandi

Dikatakannya pekerjaan betonisasi ruas Jalan Kalanganyar-Segorotambak sudah berjalan empat Minggu. Pengerjaannya saat ini memasuki tahap pemasangan dinding penahan tanah dan pemasangan saluran air atau U-Ditch.

Dikatakannya sampai saat ini progres pengerjaannya mencapai 8,12%. Angka itu melebihi target yang ditetapkan di empat Minggu pengerjaannya sebesar 1,56%.

“Inshaalloh Minggu depan atau dalam Minggu ini akan mulai dilakukan pengecoran jalan dengan target 100 meter setiap harinya,” ucapnya.

Bupati Subandi berharap betonisasi ruas Jalan Kalanganyar-Segorotambak akan meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Selain itu memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat kawasan Timur Sidoarjo yang berbatasan langsung dengan Surabaya.

Untuk itu ia mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Sidoarjo agar pengerjaannya berjalan lancar dan selesai tepat waktu.

“Mari kita jaga bersama lingkungan sekitar proyek ini karena pembangunan ini adalah untuk kita semua, untuk Sidoarjo yang semakin maju, nyaman, dan sejahtera sesuai dengan harapan kita Bersama,” ujarnya.

Apid pelaksana proyek betonisasi ruas Jalan Kalanganyar-Segorotambak mengatakan dalam Minggu ini akan dilakukan pengerjaan pengecoran lapisan dasar. Setelah itu akan dilakukan pembetonan jalan dengan tebal 20 cm.

Bupati berharap pengerjaannya berjalan lancar sesuai kontrak selesai pengerjaannya tanggal 21 Desember 2025. Pengerjaannya sendiri juga akan dipercepatnya.

“Kendala pengerjaannya selama ini tidak ada, hanya saja lalu lintas yang cukup padat karena ini salah satu akses jalan utama menuju Surabaya,” ucapnya.

Sementara itu Uripan warga sekitar mengaku gembira terhadap proyek betonisasi ruas jalan Kalanganyar-Segorotambak tersebut. Sebelumnya dikeluhkannya bahwa kondisi jalan tersebut kerap membawa korban kecelakaan. Jalan yang bergelombang dan becek saat hujan menyebabkan banyak pengendara terjatuh.

“Sebagai warga sangat berterima kasihlah, jalan sudah tidak bergelombang lagi, jalan menjadi mulus, jalan menjadi enak untuk warga beraktivitas,” ucapnya. (Rin)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Satgas TMMD ke-126 Kodim 0816/Sidoarjo Bersama Dinas Perikanan Tinjau Kolam Ikan di Desa Kedondong



Progresjatim.com, Sidoarjo – Jumat (10 Oktober 2025) – Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126 Kodim 0816/Sidoarjo melaksanakan kegiatan pendampingan peninjauan lokasi kolam ikan di Desa Kedondong, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo.

Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, sebagai bentuk sinergi nyata antara TNI dan pemerintah daerah dalam menyiapkan sarana budidaya ikan yang akan dimanfaatkan oleh warga setempat.

Peninjauan ini dipimpin oleh Pasiterdim 0816/Sidoarjo, Kapten Inf Lukky Arie Sandhi, yang turut memberikan arahan serta penjelasan kepada perangkat desa dan masyarakat mengenai pentingnya pengembangan kolam ikan sebagai salah satu langkah mendukung kemandirian pangan berbasis lokal. Dalam keterangannya, Kapten Inf Lukky Arie Sandhi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari wujud kepedulian TNI terhadap peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka.

“Peninjauan kolam ikan ini merupakan salah satu program pendukung TMMD ke-126 yang bertujuan mendorong masyarakat agar lebih mandiri secara ekonomi. Kolam ini nantinya akan diisi oleh Dinas Perikanan dan dikelola langsung oleh warga. Harapan kami, program ini dapat menjadi sumber penghasilan tambahan sekaligus meningkatkan ketersediaan pangan berbasis protein hewani di desa,” ujar Kapten Inf Lukky.



Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kegiatan TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, rumah layak huni, maupun sarana umum lainnya, tetapi juga mencakup pembangunan nonfisik yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin TMMD benar-benar menghadirkan manfaat jangka panjang. Warga bisa belajar budidaya ikan, memanfaatkan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari, dan bahkan mengembangkannya menjadi usaha produktif yang menggerakkan ekonomi desa,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo yang turut hadir menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama yang diberikan oleh Kodim 0816/Sidoarjo. Menurutnya, sinergi lintas sektor seperti ini sangat penting dalam mempercepat terwujudnya desa yang mandiri dan tangguh pangan.

Kegiatan peninjauan berlangsung lancar dan penuh semangat gotong royong. Kolam yang ditinjau direncanakan akan segera diisi dengan benih ikan lele dan nila setelah seluruh persiapan dan pemeriksaan kondisi kolam selesai dilakukan.

Melalui program ini, Satgas TMMD ke-126 Kodim 0816/Sidoarjo kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah untuk menciptakan desa yang mandiri, produktif, dan berdaya saing, dengan menjalin kolaborasi harmonis antara TNI dan masyarakat.(GUS)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Anggota DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori Yakin Santri asal Tulangan Meninggal Syahid



KETIK, SIDOARJO – Sudah 12 hari berlalu. Sukirman terus menunggu. Di antara kepasrahan, kesedihan, dan rasa kehilangan, warga RT 1/RW 1, Desa Singopadu, Kecamatan Tulangan itu, mengaku lega kabar kepastian datang pada Kamis (9 Oktober 2025). Putranya, Fairuz Shirodjudin, telah dikenali. Reruntuhan beton Musala Ponpes Al Khoziny merenggut nyawa remaja 16 tahun itu.

Fairuz adalah satu di antara 67 korban tewas akibat tragedi ambruknya gedung 3 lantai di Pondok Pesantren Al Khoziny, Desa Siwalan Panji, Kecamatan Buduran, pada Senin (29 September 2025) lalu. Jenazahnya ditemukan pada hari-hari terakhir pencarian oleh Tim SAR Basarnas.

"Alhamdulillah, waktu itu anak saya sedang berpuasa Senin-Kamis," ungkap Sukirman kepada anggota DPRD Sidoarjo H Dhamroni Chudlori yang bertakziah ke rumahnya pada Jumat (10 Oktober 2025). Dhamroni pun membenarkan bahwa Fairuz meninggal dalam kondisi yang mulia. Sedang salat berjamaah di musala yang ambruk itu. Begitu pula para santri lain yang gugur saat menimba ilmu di pondok pesantren.



"Insya Allah syahid," kata Dhamroni Chudlori yang datang bersama perangkat Desa Singopadu, tenaga kesehatan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Sukirman tetap berusaha tersenyum. Tabah. Namun, sang istri, Febri Kurniyati Ningsih, terlihat belum mampu menghapus kesedihan. Perempuan berkerudung itu duduk bersandar di dinding. Tatapan matanya terlihat kosong. Wajahnya tertunduk. Kehilangan putra tercinta benar-benar mencengkeram batinnya sebagai seorang ibu. Begitu ada ibu-ibu lain yang mengucapkan duka cita dan ikut kehilangan,



Febri Kurniyati langsung menangis. Dia sesenggukan. "Sabar nggih Bu. Tabah," ucap para pentakziah yang bergantian memeluk Febri. Tanda ikut berbela sungkawa sebagai orang tua.

Hingga Jumat pagi, Sukirman dan Febri Kurniyati menanti jenazah putra mereka tiba di rumah. Fairuz merupakan anak kedua. Dia punya saudara kembar perempuan bernama Fairuza Qurrotul Ainiya. Keduanya sama-sama duduk di kelas XI atau kelas 2 SMA. Yang melegakan, mereka mendapat kabar bahwa jenazah Fairuz dijadwalkan tiba pada hari Jumat ini. Mereka menunggu untuk persiapan pemakaman dan doa tahlilan malam harinya.



Pukul berapa tiba? "Belum tahu. Kami nunggu kabar dari rumah sakit," tutur Sukirman.

Jenazah Fairuz memang dibawa ke RS Bhayangkara Polda Jatim di Surabaya. Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jatim telah berhasil mengenali jenazah Fairuz serta santri-santri lainnya melalui proses yang panjang. Sebagai anggota DPRD Sidoarjo asal Tulangan, H Dhamroni Chudlori menyatakan dirinya ikut berbela sungkawa sedalam-dalamnya atas musibah yang dialami keluarga Sukirman dan Febri Kurniyati. Legislator PKB itu siap membantu bila keluarga itu masih membutuhkan bantuan. Atau, mendapat kesulitan terkait musibah ini.



Pelatihan Tata Rias Warga Tulangan, Dorong Kemandirian dan Kreativitas Masyarakat Desa



seputarindonesiatv.id || **Sidoarjo** – Senin, 13 Oktober 2025. Sebagai bagian dari kegiatan non-fisik dalam rangka TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126 Tahun 2025, Satgas TMMD Kodim 0816/Sidoarjo bersama Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo melaksanakan Pelatihan Tata Rias yang digelar di Desa Kedondong, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan pelatihan ini terselenggara berkat kolaborasi antara TNI Kodim 0816/Sidoarjo, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, dan Pemerintah Desa Kedondong. Tujuannya adalah memberikan bekal keterampilan dan pengetahuan praktis bagi warga desa, khususnya para ibu rumah tangga dan remaja putri, agar memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan menjadi peluang usaha mandiri.

Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh semangat. Para peserta tampak antusias mengikuti setiap sesi pelatihan yang dipandu oleh instruktur dari Dinas Tenaga Kerja. Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan materi teori dan praktik langsung tentang dasar-dasar merias wajah, pemilihan kosmetik yang aman, hingga teknik tata rias untuk acara formal maupun pesta pernikahan. Pelatihan ini disambut positif oleh masyarakat setempat. Banyak peserta yang mengaku senang karena kegiatan ini tidak hanya menambah wawasan dan keterampilan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga desa.

Dalam kesempatan itu, Batiter Kodim 0816/Sidoarjo, Pelda Sutrisno, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini. “Melalui TMMD, TNI berupaya hadir tidak hanya dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga membangun sumber daya manusia yang berdaya dan mandiri. Pelatihan ini merupakan langkah kecil namun berarti dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa,” ujar Pelda Sutrisno.





Beliau juga menambahkan bahwa kegiatan non-fisik seperti ini menjadi bagian penting dari program TMMD, karena menyentuh langsung kehidupan sosial dan ekonomi warga. “Kami berharap keterampilan yang diperoleh hari ini dapat dikembangkan menjadi usaha produktif sehingga masyarakat bisa lebih sejahtera dan mandiri,” imbuhnya. Sementara itu, Kepala Desa Kedondong turut mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasinya atas perhatian Satgas TMMD serta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. “Kami sangat berterima kasih atas kepedulian TNI dan Disnaker. Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat kami, terutama bagi para ibu dan remaja putri yang ingin menambah keterampilan dan penghasilan,” ucapnya.

Kegiatan pelatihan berjalan dengan tertib, lancar, dan penuh semangat kebersamaan. Melalui TMMD ke-126, Kodim 0816/Sidoarjo terus berkomitmen mendukung pemberdayaan masyarakat desa — tidak hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui peningkatan keterampilan dan potensi manusia. Dengan langkah-langkah sederhana seperti pelatihan ini, TNI berharap masyarakat desa semakin kreatif, produktif, dan mampu mewujudkan desa yang mandiri, maju, serta sejahtera.

Pemkab sidoarjo Gerak Cepat, Kebut Normalisasi Sungai Jelang Musim Hujan



SIDOARJO, BIDIKNASIONAL.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus mempercepat upaya normalisasi sungai untuk mengantisipasi banjir menjelang musim hujan tahun ini. Sejumlah titik di wilayah Kota Delta kini menjadi fokus pengerukan. Pengerjaan dilakukan di beberapa afvour, antara lain di Desa Candi hingga Klurak, Afvour Trengguli di Desa Kedungkembar Kecamatan Prambon, Afvour Kedungkumpul di Desa Tanjekwagir Kecamatan Krembung, serta Afvour Kedungpeluk di Kecamatan Candi.

Alat berat telah dikerahkan untuk melakukan pengerukan di titik-titik tersebut. Lumpur dan endapan yang menumpuk di dasar sungai diangkat ke permukaan agar aliran air kembali lancar. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, upaya ini dilakukan karena wilayah Sidoarjo segera memasuki musim hujan. Dengan normalisasi sungai, diharapkan daya tampung air meningkat dan risiko banjir dapat ditekan. “Ini sudah mendekati musim hujan. Upaya normalisasi terus kita lakukan agar sungai-sungai bisa menampung air lebih banyak. Supaya tidak banjir saat hujan nanti,” ujar Bupati Subandi, Senin (13/10/2025). Menurutnya, panjang sungai yang dinormalisasi bervariasi. Di Klurak, misalnya, proses pengerukan dilakukan sepanjang sekitar 1,2 kilometer. Sementara di Kedungpeluk, panjangnya mencapai 2,3 kilometer.

“Alat berat sudah bekerja di sana. Kita berharap prosesnya berjalan cepat dan tanpa kendala, supaya sungai-sungai itu kembali normal dan mampu menampung air saat hujan,” lanjutnya. Normalisasi dilakukan dengan mengangkat lumpur dan endapan hingga kedalaman sungai kembali ke kondisi ideal. Dengan demikian, kapasitas sungai untuk menampung air meningkat dan potensi banjir dapat diminimalisir.

Bupati Subandi juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama dengan tidak membuang sampah ke sungai. Kebiasaan buruk tersebut menjadi penyebab utama pendangkalan dan penyumbatan aliran air. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) juga terus melakukan sosialisasi dan pengawasan. Petugas bahkan siap menindak warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan. “Upaya itu terus kita lakukan. Tapi yang lebih penting adalah kesadaran warga. Makanya, kita lebih mengoptimalkan sosialisasi agar masyarakat benar-benar sadar dan tidak sembarangan membuang sampah,” tegas Bupati Subandi.



Komisi A dan C, Besok Melihat Tembok yang Timbulkan Konflik di Banjar Bendo



Sidoarjo – cakrajatim.com: Komisi A dan C akan melakukan Sidak bersama Selasa (14/10) di Perumahan Mutiara Regency dan Mutiara City yang tengah berkonflik soal tembok pembatas. “Kita akan cek di lapangan untuk mencari akar persoalannya.” Ujar ketua Komisi A, Riza Ali Faidzin, Senin sore. Ada apa ini sampai membuat geger Sidoarjo, DPRD harus tahu persoalan yang ada di lapangan dan akan membantu mencari solusi. Ketua komisi C, Choirul Hidayat juga setuju melakukan sidak bersama Selasa siang.

H.Rahmat Muhajirin SH selaku tim ahli Wabup mengingatkan kenapa persoalan sepele soal peruntukan jalan lingkungan harus melibatkan unsur dari pemerintah pusat sampai provinsi. “Urusan sepele ini kan selesai cukup di tingkat kades saja.” Ujar Rahmat. Termasuk aturan hukum yang menjadi dasar apakah jalan penghubung mutiara regency – mutiara harum itu, bisa dibuka untuk diintegrasikan untuk mutiara city. Sebelumnya turun surat dari kementerian tentang perintah pengintegrasian jalan akses tiga perumahan itu, langsung dari Kementerian Perumahan dan kawasan pemukiman.

Surat dengan nomor PA 0105-PP/230 yang ditandatangani Kreshnarisa Harapan selalu Direktur sistem dan strategis kawasan pemukiman Kementerian Perumahan itu, jelas tertulis meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui dinas terkait, untuk segera menyambungkan jalan di tiga perumahan itu. Padahal dari aturan yang ada, sesuai Dari data yang sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 UU nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, jalan tersebut merupakan jalan fungsi lingkungan, yang merupakan kewenangan desa dan kepala daerah. Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut belum menemukan titik terang dan kesimpulan. “Kita akan lakukan media lanjutan dan semoga nanti ada kesimpulan. Kita juga akan hadirkan ketua dewan,” ujar Wabup. Sementara itu dalam peta lokasi yang ada, ternyata ada sawah TKD diantara perumahan mutiara city dan mutiara regency. TKD ini, masih belum terbangun jalan apapun, sehingga untuk mengintegrasikan jalur dua perumahan ini, perlu ada langkah pembebasan yang itu tidak mudah prosesnya (G.D)

➡CakraJatim.com



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPRD Sidoarjo Dorong Raperda Fasilitasi Pesantren Perkuat Dunia Pendidikan Islam



Sidoarjo, Sekilasmedia.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo tengah menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat eksistensi pondok pesantren melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif tentang Fasilitasi Pesantren. Raperda ini digagas sebagai bentuk komitmen menghadirkan payung hukum yang kuat bagi pengembangan pesantren di Sidoarjo.

Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, menyebut bahwa pembahasan Raperda tersebut menjadi salah satu prioritas utama dewan. Menurutnya, pesantren memiliki peran penting dalam pembentukan karakter bangsa dan patut mendapat dukungan nyata dari pemerintah daerah.

“Raperda ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Kami ingin memastikan pesantren mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah, mulai dari perizinan, pembinaan, hingga dukungan fasilitas,” ujar Abdillah Nasih usai rapat paripurna, Rabu (8/10).

Abdillah menjelaskan, melalui regulasi ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan perlindungan, pendampingan, serta kemudahan administrasi bagi pesantren. Raperda juga akan mengatur tentang pembinaan dan dukungan pendanaan, termasuk membuka peluang adanya dana abadi pesantren sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

“Selama ini pesantren menjadi institusi yang paling berperan dalam menanamkan nilai moral dan akhlak generasi muda. Karena itu, sudah sepatutnya negara hadir untuk memperkuatnya,” tegasnya.

Dalam penyusunan Raperda ini, DPRD Sidoarjo berencana melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Agama (Kemenag), Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI), hingga tokoh dan pimpinan pesantren di wilayah Sidoarjo. Tujuannya, agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar komprehensif dan sesuai kebutuhan lapangan.

Abdillah menambahkan, pihaknya menargetkan draf awal Raperda Fasilitasi Pesantren rampung pada Oktober ini, bertepatan dengan momentum Hari Santri Nasional. Setelah itu, pembahasan akan berlanjut pada tahap finalisasi bersama pihak eksekutif.



Tingkatkan Produksi Pertanian. Wabup Mimik Idayana Serahkan Bantuan Hibah Alat dan Mesin Pemanen di Sukodono



Wakil Bupati Sidoarjo, H. Mimik Idayana menyerahkan bantuan hibah alat dan mesin pemanen Combine Harvester kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa/Kecamatan Sukodono, Senin (13/10/2025). (foto : dok/wartanusa.net)

SIDOARJO – wartanusa.net Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, H. Mimik Idayana, menyerahkan bantuan hibah alat dan mesin pertanian berupa satu unit Combine Harvester (alat pemanen) kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa/Kecamatan Sukodono. Penyerahan yang berlangsung di kantor desa setempat ini turut didampingi oleh perwakilan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, Senin (13/10/2025). Bantuan ini merupakan realisasi dari program Kementerian Pertanian Tahun 2025, yang disalurkan atas aspirasi dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia (TMI) Sidoarjo. Ini adalah bantuan Combine Harvester kedua yang diterima Kabupaten Sidoarjo tahun ini, setelah sebelumnya bantuan serupa diserahkan kepada gapoktan di wilayah Kecamatan Taman.

Wabup H. Mimik Idayana berpesan kepada para petani penerima manfaat untuk dapat merawat dan menjaga alat dan mesin pertanian ini dengan sebaik-baiknya. “Tolong dijaga dan dirawat Alat dan mesin pertanian ini agar kondisinya tetap baik dan dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga manfaatnya bisa terus dirasakan,” pinta H. Mimik Idayana. Wabup yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat DPD Tani Merdeka Indonesia Sidoarjo ini menyatakan bahwa mesin pemanen padi modern tersebut tidak hanya terbatas untuk petani Sukodono. “Alat dan mesin ini juga bisa dimanfaatkan oleh desa-desa lain di wilayah Kecamatan Sukodono untuk kepentingan pertanian, dengan pengawasan dari DPD Tani Merdeka Sidoarjo,” jelasnya, menekankan penting gotong royong dan kebersamaan.

Kepala Desa (Kades) Sukodono, Supi'i, menyambut gembira bantuan tersebut dan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Wabup Mimik Idayana. “Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan upaya yang dilakukan oleh Ibu Mimik Idayana, sehingga kami bisa mendapat bantuan hibah mesin Combine Harvester ini. Tentu ini sangat membantu dan akan meningkatkan efisiensi kerja para petani kami,” tegas Kades Supi'i. Penyerahan Alat dan mesin ini dilakukan secara simbolis oleh Wabup Mimik Idayana kepada Ketua Gapoktan Desa Sukodono, Solichin. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Sidoarjo, Urip Prayitno, jajaran Forkopimda, serta perwakilan kelompok tani setempat. Bantuan ini diharapkan dapat mengakselerasi proses panen, menekan biaya produksi, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Sidoarjo khususnya di wilayah Kecamatan Sukodono. (dar/nata/red)

Tolak Akses Pembukaan Jalan dan Pembongkaran Tembok Batas, Warga Mutiara Regency Wadul Wabup Sidoarjo



Sidoarjo (republikjatim.com) - Sejumlah tokoh masyarakat perwakilan warga Perumahan Mutiara Regency Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo mengadu (Wadul) ke Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Mimik Idayana. Rombongan perwakilan warga ini diterima di Rumah Dinas (Rumdis) JL Sultan Agung, Sidoarjo Jumat (10/10/2025).

Para perwakilan warga ini, mengadu soal rencana akan dibongkarnya tembok pembatas Perumahan Mutiara Regency untuk akses menuju perumahan baru yakni Mutiara City yang posisi geografis di sisi selatan atau di belakang perumahan Mutiara Regency dari Jalan Raya Utama Jati, Kecamatan Sidoarjo

Salah satu tokoh masyarakat Perumahan Mutiara Regency, Suhartono mengatakan warga Perumahan Mutiara Regency sejak awal menolak jika tembok pembatas Perumahan Mutiara Regency dijebol untuk dimanfaatkan satu jalur dengan Perumahan Mutiara City.

"Penolakan itu sudah lama dikaji dan dipelajari warga kami. Karena banyak pertimbangan yang menjadikan warga Perumahan Mutiara Regency menolak akses jalan perumahannya dijadikan satu akses dengan perumahan baru (Regency City) yang posisinya kini berada di belakang Perumahan Mutiara Regency itu," ujarnya usai mengadu ke Wabup Sidoarjo, Mimik Idayana, Jumat (10/10/2025).



Suhartono yang juga menjabat Ketua RW 16 ini menjelaskan tembok pembatas Perumahan Mutiara Regency itu sudah berdiri atau dibangun sejak 20 tahun silam. Namun kenapa kini akses jalan perumahan belakang mau ikut jalan Perumahan Mutiara Regency.

"Mau ikut jalan perumahan kami caranya dengan meniebol tembok pembatas supaya tembus lurus sampai ke JL Raya Jati. Kami dan warga lainnya pemilik perumahan one gate system ini jelas dirugikan dan jelas kami keberatan. Akses Perumahan Mutiara City, mestinya punya akses jalan sendiri, jangan memanfaatkan akses jalan perumahan kami atau perumahan lain. Sampai kapan pun, tembok pembatas ini akan tetap kami pertahankan. Toh pengembang perumahan juga beda! Kenapa mengganggu lingkungan dan ketenangan warga kami," paparnya.

Selain itu, Suhartono mengaku juga pernah merasakan mediasi dari pihak pengembang perumahan baru itu, dengan warga. Saat pertemuan, warga semuanya menolak. Bahkan, warga juga mendirikan baliho besar terkait penolakan satu akses jalan Perumahan Mutiara Regency dan Mutiara City.

"Dalam masalah ini, pihak desa juga tidak pernah mensosialisasikan atau mengumpulkan warga Perumahan Mutiara Regency dengan Mutiara City. Ini sebenarnya ada masalah apa?" katanya.

Meski ada surat dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat soal akan diiebolnya tembok pembatas itu, sebagai akses jalan utama, antar perumahan, kata Hartono warga perumahannya akan tetap menolak rencana pemerintah daerah dan pusat itu.

"Sampai kapan pun, kami tetap akan mempertahankan tembok itu. Kami juga tetap akan menolak akses jalan Perumahan Mutiara Regency menjadi satu jalur dengan Perumahan Mutiara City," tegasnya.

Selama ini, lanjut Hartono warga Perumahan Mutiara Regency juga merasa heran atas adanya perintah pembongkaran tembok agar jalan tembus dari belakang hingga depan dan bisa jalan ke raya itu. Apalagi, posisi perumahan baru Mutiara City itu tidak berada di belakang persis perumahan Mutiara Regency. Melainkan, harus melalui dua space ruang lainnya. Yakni di belakang perumahan Mutiara Regency masih ada tanah kas desa (TKD) yang luas dan termasuk juga lahan seseorang yang juga luas. Baru kemudian lokasi perumahan Mutiara City.